

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dinamika eskalasi teritorial, ilegal fishing, kebijakan politik luar negeri dan peningkatan kapabilitas di Laut Natuna Utara (LNU) yang melibatkan beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Tetapi lebih spesifik ke dalam hubungan antara Tiongkok-Indonesia dalam segi kebijakan maritimnya. Secara geografis Laut Natuna Utara berada di wilayah Samudera Pasifik dan berbatasan dengan Asia Tenggara. LNU yang dipersengketakan mencakup wilayah seluas 3.658.000 km². LNU terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Tiongkok & Taiwan, di sebelah barat Filipina, di sebelah barat laut Malaysia & Brunei, di sebelah utara Indonesia, dan di sebelah timur laut Singapura & Vietnam. LNU memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Di wilayah ini terdapat cadangan minyak sekitar 28 juta barel, cadangan gas alam sejumlah 7.500 km², dan ekosistem bihayati dunia satu pertiganya berada di wilayah ini. Laut Natuna Utara juga menjadi lalu lintas perdagangan laut yang cukup penting dalam hubungan internasional di regional (Heryadi 2012).

Penelitian ini hanya memfokuskan sengketa yang terjadi di antara negara Indonesia & Tiongkok. Sengketa yang dimaksud adanya tumpang tindih perbatasan serta klaim teritori yang diakui oleh negara Tiongkok didasarkan pada tiga alasan utama yakni : klaim teritorial di kawasan Laut Natuna Utara (LNU) didasarkan oleh *nine dashed line* yang berimbas terhadap pelanggaran teritorial dan ilegal fishing, kebijakan politik luar negeri Tiongkok-Indonesia, dan persepsi kerja sama atau ancaman *Maritime Silk Road*. Klaim ini mencuat ketika Tiongkok mengemukakan doktrin *Nine dash Line* atau *Zengmu Ansha* sebagai dasar klaim Tiongkok atas laut serta pulau-pulau yang berada di Laut Natuna Utara. *Zengmu Ansha* sebagai doktrin yang dituangkan dalam kebijakan asertif Tiongkok yang diimplementasikan ke dalam *Maritime Silk Road* karena rakyat dan pemerintahan

Tiongkok selain melakukan internalisasi peta tersebut kepada rakyat Tionghoa. Hal tersebut harus dipahami karena doktrin tersebut menjadikan pemerintahan RRT agresif dalam permasalahan di Laut Natuna Utara. Tiongkok mulai mengklaim perairan dengan mulai menggambar ulang petanya, mendefinisikan ulang perbatasan, manufaktur bukti sejarah, menggunakan kekuatan untuk membuat batas teritorial baru, mengganti nama pulau, dan berusaha untuk memaksakan versi sejarahnya di perairan wilayah (Malik 2013).

Meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok secara masif beberapa tahun ini menjadi faktor dasar dalam memahami hubungan internasional abad 21. Pada tanggal 3 Oktober 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan secara resmi konsep Jalur Sutra Maritim abad ke-21 atau “21st *Century Maritime Silk Road*” di depan parlemen Indonesia. Jika dipahami secara spesifik inti kebijakan tersebut adalah pembangunan infrastruktur transportasi laut dari daratan Tiongkok hingga pelabuhan-pelabuhan utama di berbagai Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Tiongkok berambisi memadukan kedua jalur perdagangan laut dan darat yang telah berlangsung selama ribuan tahun menjadi satu konsep jalur perdagangan yang terintegrasi, yang dikenal dengan sebutan *Belt Road Initiative (BRI)*. Melalui *Maritime Silk Road (MSR)*, Tiongkok sedang mengupayakan kerja sama dengan negara-negara lain di sepanjang jalur melalui penguatan kepercayaan dengan negara mitra untuk memelihara stabilitas dan kemakmuran regional.

Kebangkitan Tiongkok menjadi negara yang kuat secara ekonomi menjadi pesaing nyata Amerika Serikat (AS) dalam perebutan kekuasaan tertinggi dalam tatanan masyarakat internasional. Kebijakan luar negeri dibawah pemerintahan Presiden Jokowi adalah bagaimana pendekatan Indonesia kepada Tiongkok, bahwa kebijakan pemerintahan sekarang cenderung agak menjauh dari AS dan condong ke Tiongkok. Kecenderungan ini dikaitkan dengan program pembangunan infrastruktur kemaritiman yang terwacanakan dalam pilar-pilar PMD oleh Presiden Jokowi, dimana Tiongkok dianggap mitra yang tepat untuk mendukung program itu. Di satu sisi Indonesia membutuhkan Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur perekonomian, kemaritiman, logistik, dan lain-lain.

Dalam konteks ini Indonesia mempersepsikan Tiongkok sebagai mitra bisnis yang dapat dipercaya. Namun di sisi lain, Indonesia harus tetap waspada terhadap kepentingan Tiongkok di kawasan Laut Natuna Utara. Kebijakan asertif Tiongkok dalam Jalur Sutera Maritim serta klaim berdasarkan doktrin *Zengmu Ansha* di kawasan sengketa batas teritorial berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia mempersepsikan Tiongkok sebagai ancaman.

Kapal nelayan Tiongkok the *Kway Fey* tahun 2016 ditahan oleh kapal patroli Indonesia karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia (Supriyanto 2016b). Situasi meningkat ketika kapal penjaga pantai Tiongkok mendekati teritorial 12 mil laut Indonesia di Pulau Bunguran (Natuna Besar) dan menabrak *Kway Fey* untuk berenti, lalu muncul kapal penjaga pantai lainnya sehingga angkata laut Indonesia memutuskan untuk meninggalkan kapal tersebut. *Kway Fey* dan petugas penjaga pantai Tiongkok menaiki kapal dan mengarahkannya menjauh dari perairan Indonesia (Supriyanto 2016a). Kapal-kapal Tiongkok sebelumnya telah telah didakwa melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, insiden ini belum pernah terjadi dari kedua belah pihak. Di pihak Tiongkok berlayar begitu dekat dengan laut teritorial 12 mil laut Indonesia. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Indonesia melanggar pendekatan tradisionalnya yang meremehkan serangan Tiongkok sebagai insiden kecil dan memanggil duta besar Tiongkok di Jakarta untuk meminta klarifikasi mengenai masalah tersebut (Agustinus Beo Da Costa 2016).

Kedua doktrin maritim kelihatan saling melengkapi satu sama lain, tetapi masih ada keraguan di antara kedua belah pihak yang dapat membatasi kerja sama penuh antara kedua negara. Masalah utama adalah ilegal fishing dan yang kedua adalah konflik teritorial yang sedang berkembang di Laut Natuna Utara. Kedua isu tersebut saling terkait satu sama lain dalam beberapa hal. Sejak Presiden Jokowi berkuasa, dia memiliki sikap keras terhadap penangkapan ikan ilegal. Indonesia menjadikan kelautan sebagai sektor utama perekonomiannya. Namun, karena penangkapan ikan ilegal, Indonesia kehilangan sekitar US \$25 miliar per

tahun (Hutton 2014). Maka untuk mengatasi masalah ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam tahun pertamanya menjabat memerintahkan penenggalan 106 kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia (Aminoni 2015). Sebagian besar kapal ilegal berasal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia juga mulai mengambil sikap lebih keras terhadap Tiongkok. Indonesia telah menyita beberapa kapal dan menenggelamkan kapal Tiongkok. Kemudian, Jakarta secara sepihak mencabut kerja sama bilateral perikanan yang ditandatangani pada Oktober 2013 (Zhou 2015b). Untuk menegakkan klaimnya atas sembilan garis putus-putus, Tiongkok menggunakan nelayannya sebagai proxy dan memberi mereka dukungan secara finansial dan politik untuk kegiatan penangkapan perairan yang diperebutkan (Zhou 2015a) Presiden Xi saat mengunjungi kota nelayan Tanmen di Hainan, menyarankan para nelayan untuk tidak hanya penangkapan ikan tetapi juga mengumpulkan informasi kelautan dan mendukung pembangunan pulau dan terumbu karang. (Zhou 2015a).

Tiongkok telah memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam peta teritorialnya di dalam sembilan garis putus-putus, peta itu termasuk dalam paspor baru warga negara Tiongkok (Antara Berita 2014). Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Tiongkok mengakui kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna, tetapi tidak berkomentar tentang tumpang tindih sembilan garis putus-putus dan ZEE Indonesia (Yu 2015). Ketidakjelasan pernyataan Tiongkok mengenai di sembilan garis putus-putus berkontribusi pada ketidakpastian di antara pembuat kebijakan Indonesia tentang motif Tiongkok di wilayah tersebut (Supriyanto 2016a). Tiongkok terus menggunakan alasan zona penangkapan ikan tradisional di perairan Natuna untuk mendukung klaimnya tidak merambah wilayah Indonesia (Cochrane 2016). Pihak Indonesia sendiri telah menolak untuk mengakui zona penangkapan ikan tradisional yang diklaim Tiongkok dan melihat perambahan sebagai perusakan kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna (Yosephine 2016). Permasalahan ilegal fishing, kebijakan asertif Tiongkok, dan konflik teritorial adalah kemungkinan hambatan yang menjadi penghalang bagi hubungan diplomatik dan ekonomi kedua negara. Oleh sebab itu penulisan mengenai doktrin maritim kedua

negara perlu dikaji secara mendalam sehingga dapat terinci gambaran hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam kepentingan maritim MSR Tiongkok dan PMD Indonesia di Laut Natuna Utara.

Meskipun dua negara yang saling memiliki agenda maritim, Tiongkok dan Indonesia memiliki banyak aspek yang tumpang tindih. Prioritas yang perlu menjadi indikator pertimbangan dalam menganalisa aspek komplementer dari kedua agenda ini adalah “konektivitas”. Kedua negara mengedepankan agenda maritim masing-masing, yang menekankan pada konektivitas. Presiden Xi mengemukakan gagasan abad 21 *Maritime Silk Road* (MSR) berusaha untuk menghubungkan Eropa melalui Asia Tenggara dan Afrika. Sedangkan Indonesia dibawah Presiden Jokowi mengusulkan PMD untuk menghubungkan banyak pulau yang membentuk jalur-jalur baru yang menyatukan konektivitas Indonesia. Membandingkan tujuan masing-masing dari dua doktrin maritim dapat disimpulkan bahwa MSR Tiongkok bersifat internasional karena memprioritaskan untuk mengembangkan dan mendorong interaksi yang lebih dekat dengan negara-negara terdekat dengan harapan dapat menjalin lebih banyak aliansi serta kemitraan. Sementara Indonesia dalam doktrin PMD mengedepankan pembangunan dalam negeri secara berkala, sehingga kebijakan luar negeri dalam tatanan internasional berkurang intensitasnya. Tetapi implikasi diplomasi maritim dan keamanan maritim yang tertuang dalam PMD tetap menjadi fokus Indonesia.

Kebijakan nasional Indonesia selama ini masih berorientasi kepada daratan (*Land Base Oriented Development*) dan masih jauh dari perkembangan orientasi kelautan (*Sea Base Oriented Development*). Bergesernya pusat politik dan ekonomi ke Samudera Pasifik khususnya Laut Natuna Utara, ikut merubah geopolitik regional yang ditandai semakin menguatnya pertarungan hegemoni di kawasan LNU. Menghadapi kompetisi yang semakin menguat di kawasan LNU, pemerintahan Indonesia melalui Poros Maritim Dunia yang digulirkan melalui KTT Asia Timur di Naypyidaw Myanmar, 13 November 2014. PMD merupakan fokus Indonesia dalam pengembangan sektor kelautan melalui pengembangan lima pilar (Yani & Montratama, 2015: 25-26), yakni : 1. Budaya Maritim, 2. Ekonomi Maritim, 3. Konektivitas Maritim, 4. Diplomasi Maritim, & 5.

Keamanan Maritim. Melalui pilar ke empat & pilar ke lima optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim serta mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

. Dalam kunjungan Jokowi ke Tiongkok dilatarbelakangi menghadiri forum Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) 2014, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama khususnya di bidang pembangunan dan infrastruktur maritim. Jokowi juga telah memberikan dukungannya terhadap pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan berharap Indonesia dapat bergabung di tahap awal. (Xinhua 2014). Setelah itu Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada Maret 2015 dan sebelum kunjungan tersebut beliau menyatakan sangat tertarik untuk bekerjasama dengan Tiongkok di bidang pembangunan infrastruktur dan manufaktur (Ibrahim 2015). Namun, tidak jelas detail mengenai kerjasama MSR dan PMD secara rinci sehingga masih didiskusikan lebih lanjut. Penasihat kebijakan luar negeri Jokowi, Rizal Sukma menyatakan bahwa selama MSR bukan tentang hegemoni dan lebih mengenai kerja sama ekonomi dan diplomatik Indonesia akan dengan senang hati bekerja sama (Ibrahim 2015). Usai kunjungan tersebut, kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menyepakati pandangan MSR Tiongkok dan PMD Indonesia saling melengkapi.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia dalam pidato di Kemlu RI tersebut menggarisbawahi manfaat kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia dalam MSR dan PMD. Beliau menyatakan bahwa bagi Tiongkok, Indonesia merupakan bagian penting dari MSR karena Indonesia memiliki keunggulan di bidang sumber daya, pasar, tenaga kerja, dan geografi (Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia 2015). Ia menggambarkan mengapa lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk memanfaatkan MSR. Xie mencatat bahwa Indonesia dapat memajukan PMD dengan memanfaatkan pembangunan infrastruktur dan pengalaman teknologi yang diperoleh Tiongkok dalam 35 tahun terakhir.

Indonesia dapat memperoleh bantuan keuangan yang dapat dibutuhkan dari Tiongkok dengan memanfaatkan AIIB dan *Silk Road Fund*.

Penulis dalam penelitian ini melakukan pendekatan dengan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) dari Buzan untuk mengetahui kedekatan fokus hubungan keamanan Indonesia & China yang tidak terpisah dikarenakan karakter keamanan masing-masing negara yang saling ketergantungan, maupun kepentingan bersama. (Bunyavejchewin 2013). Pendekatan teori RSCT relevan dengan fenomena yang terjadi di Laut Natuna Utara dalam penelitian skripsi ini. Keamanan kedua negara tidak dapat dipahami tanpa memahami pola internasional yang berpengaruh terhadap interpedensi keamanan negara tersebut. Dalam peringkat analisa (Level of analysis) Studi Hubungan Internasional, pengaruh relasi ini terlihat dari level negara ke sistem internasional, atau level negara ke individu dalam hubungan yang timbal balik. Sayangnya, *security complex* cenderung diwarnai oleh permusuhan dan relasi oleh kecurigaan dan rasa takut (Buzan 2007). Kemudian dengan pendekatan sumber politik luar negeri internal dan eksternal oleh Howard Lentner dan Rosenau menjadi perpaduan yang kompleks dalam memahami penelitian ini.

2. Pertanyaan penelitian

Bagaimana implementasi strategi preventif doktrin poros maritim dunia Indonesia terhadap kebijakan jalur sutera maritim Tiongkok di kawasan Laut Natuna Utara?

3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi preventif Indonesia terhadap kebijakan maritim Tiongkok di kawasan Laut Natuna Utara.

4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengetahuan Ilmu Hubungan Internasional terkait isu yang

bersifat non-tradisional. Spesifiknya adalah kontribusi pengetahuan Ilmu Hubungan Internasional dalam kajian teoritis mengenai *Regional Security Complex* sebagai pendekatan memahami perilaku Indonesia & Tiongkok dikarenakan karakter keamanan serta doktrin kebijakan kedua negara yang mempengaruhi hubungan kedua negara yang saling bergantung dan berkepentingan bersama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam Ilmu Hubungan Internasional terkait permasalahan yang berhubungan dengan teori politik luar negeri Howard Lentner dan Rosenau.

Manfaat praktisnya menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih mengedepankan kekuatan secara maritim baik secara *soft* atau *hard*, dikarenakan selama ini orientasi nasional Indonesia berfokus ke daratan yang berbading terbalik dengan luasnya lautan Indonesia yang terhubung antar pulau-pulau. Kemudian diharapkan melalui permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai isu keamanan dan kebijakan maritim masing-masing negara yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara, khususnya Indonesia dan Tiongkok. Di samping itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk memahami fenomena ilegal fishing, pelanggaran batas teritorial, dan ancaman kapabilitas militer di LNU yang membutuhkan informasi mengenai relasi hubungan antara Indonesia dan Tiongkok.

5. Metode penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik yang bertujuan untuk menghasilkan analitik dan kesimpulan yang komprehensif. Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan metodologis dua tingkat, analisis tekstual bahan sumber utama dan interpretasi lapangan yang dicatat melalui kerangka teori. Studi ini secara teoritis berpusat pada pendekatan *regional security complex* dan politik luar negeri untuk memahami karakter keamanan serta kepentingan strategis untuk memeriksa studi kasus. Jenis pengumpulan data secara kualitatif dengan data sekunder yang

dikumpulkan melalui kegiatan kajian yang kemudian dianalisis dalam kerangka analisis untuk menjawab fokus kajian dan menghasilkan rekomendasi serta referensi kebijakan. Rangkaian kajian terdiri pengumpulan data serta informasi yang dilakukan menganalisis buku, jurnal, artikel, berita, dan pemangku kepentingan yang mempunyai kapabilitas terkait diplomasi, kemaritiman, kebijakan nasional, dan kebijakan politik luar negeri.

Pertama data sekunder dari rancangan pemerintah, situs resmi, pernyataan, artikel, dan artikel berita. Untuk mengukur hipotesis data seperti pidato utama kenegaraan, pidato presiden, menteri, dan diplomatik akan menjadi yang utama untuk menemukan kesimpulan dan penelitian. Arsip resmi akan diperoleh dari lembaga pemerintah yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan. Kemudian data akademik akan dikumpulkan dari makalah studi seperti proyek-proyek kajian dari *Center of Strategy and International Studies* (CSIS).

Pada tahap pertama ini teknik pencarian data adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nazir (1998, 112) mengenai pencarian data dengan studi kepustakaan, yaitu “Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, serta dapat melalui studi kepustakaan.

Dalam tahap pertama ini, akan dilakukan pencarian data sekunder melalui literatur atau jurnal-jurnal ilmiah yang diakses dari situs resmi pemerintah, artikel, jurnal, dan berita yang melibatkan keterkaitan Indonesia dan Tiongkok di Laut Natuna Utara dengan pendekatan karakter keamanan maritim masing-masing negara. Yaitu dalam menggali pendekatan regional security complex, melalui pemikiran Buzan dalam memahami karakter keamanan masing-masing negara yang saling bergantung dan berkepentingan.

Tahapan kedua yaitu menelusuri kerja sama secara ekonomi dan diplomatik kedua negara yang saling bergantung yang jelas posisi Tiongkok

sebagai *super power* dan Indonesia sebagai *middle power*. Melalui pemikiran Howard Lentmer dan Rosenou yang menjelaskan pemikiran politik luar negeri masing-masing dari sumber politik luar negeri sebagai relevansi yang terkait antara Tiongkok dan Indonesia. Pencarian data mengenai pemikiran politik luar negeri Howard Lentner juga dilengkapi oleh sumber data sekunder, yaitu melalui literasi, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) yang mengulas pemikiran tentang politik luar negeri Howard Lentner dan Rosenou.

Jenis penulisan pada keseluruhan skripsi ini adalah diuraikan secara kualitatif, yaitu maksudnya adalah setiap penjelasan menekankan pada deskripsi penelitian suatu masalah yang dijabarkan secara rinci dalam paragraf. Jenis penelitian kualitatif pada skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu menekankan pada kumpulan kata atau gambar.

Tabel 1. Ringkasan pencarian data dan fakta

Sumber data	Teknik pengumpulan data		Aspek data
Sekunder	Studi Kepustakaan	(a) Penelaahan dan pencatatan isi literatur atau jurnal-jurnal ilmiah yang diakses dari sumber dan perputakaan.	(a) Data terkait mengenai karakter keamanan dan kebijakan maritim kedua negara kebijakan MSR & PMD.
	Dokumentasi	(b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan non pemerintah; penelaahan dan pencatatan isi website resmi dan sah di	(b) Perolehan data mengenai klasifikasi negara maju dan berkembang menjadi indikator konsep hedging dimana posisi Tiongkok kuat

		internet; dokumen berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, catatan kebijakan, foto, gambar hidup, patung, film, dan lain lain.	sebagai negara maju, dan Indonesia sebagai middle power tidak melawan dan tidak juga mengekor
--	--	---	---

6. Sistematika penulisan

Penulisan ini terdiri atas empat bab, di dalam tiap bab terdapat sub-sub bab yang disesuaikan dengan setiap pembahasan. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi revid literatur, kerangka teoritik, operasionalisasi teori dalam alur pemikiran dan hipotesis. Bab ketiga adalah pembahasan terdiri dari subbab, yang mengkaji kronologi konflik negara Indonesia-Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan pendekatan *Regional Security Complex*. Mengkaji doktrin maritim yang dikedepankan kedua negara, serta menelusuri kerja sama ekonomi kedua negara yang saling bergantung satu sama lain yang menimbulkan pendekatan secara kebijakan politik luar negeri. Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dan inferen dari penelitian ini.